

DAFTAR PUSTAKA

- Andonova, Vesna, Marjan Nikolov dan Ana Marija Petrovska. 2017. "Governance, Transparency and Accountability at Local Government Level: Budget Transparency of Macedonian Municipalities". *CEA Journal of Economics*, vol. 12, no. 1 : 24-27. Diakses pada 13 Juni 2018. <https://journal.cea.org.mk/index.php/cejournal/article/view/112>
- Taber, W.R., 1983. "Towards Understanding the Role of Auditing in the Public Sector" Dikutip dalam Laswad, F., Richard Fisher, dan Peter Oyelere. 2005." *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 24, no. 2 : 101-121. Diakses pada 18 Juli 2018. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425404000973>
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka. Aceh Selatan :BPS Kabupaten Aceh Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka. Aceh Tengah: BPS Kabupaten Aceh Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Belitung Dalam Angka. Belitung : BPS Kabupaten Belitung.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Angka. Bengkulu Utara BPS Kabupaten Bengkulu Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka. Buru Selatan : BPS Kabupaten Buru Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka. Kepulauan Anambas : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Kepulauan Natuna Dalam Angka. Kepulauan Natuna : BPS Kabupaten Natuna.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Angka. Maluku Tenggara : BPS Kabupaten Maluku Tenggara.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Angka. Maluku Tenggara Barat : BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka. Musi Rawas Utara : BPS Kabupaten Musi Rawas Utara .
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka. Nagan Raya: BPS Kabupaten Nagan Raya.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Angka. Ogan Komering Ulu : BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka. Ogan Komering Ulu Selatan : BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka. Penukal Abab Lematang Ilir : BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka. Seram Bagian Timur : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Tual Dalam Angka. Ambon : BPS Kota Tual
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka. Tanjung Jabung Timur : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Ambon Dalam Angka. Ambon : BPS Kota Ambon
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Banda Aceh Dalam Angka. Banda Aceh : BPS Kota Banda Aceh
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Bandar Lampung Dalam Angka. Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu : BPS Kota Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Padang Panjang Dalam Angka. Padang Panjang : BPS Kabupaten Padang Panjang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Payakumbuh Dalam Angka. Payakumbuh: BPS Kota Payakumbuh.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Prabumulih Dalam Angka. Prabumulih : BPS Kota Prabumulih .
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Sawahlunto Dalam Angka. Sawahlunto: BPS Kota Sawahlunto.

- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Sibolga Dalam Angka. Sibolga: BPS Kota Sibolga.
- Buijze, Anoeska. 2013. "The Six Faces of Transparency". *Utrecht Law Review*, vol 9, no. 3 (July): 10. Diakses pada 18 Juli 2018. <http://doi.org/10.18352/ulr.233>
- Christiaens, J., 1999. "Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation." Dikutip dalam Laswad, F., Richard Fisher, dan Peter Oyelere. 2005. "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities." *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 24, no. 2 : 101-121. Diakses pada 18 Juli 2018. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425404000973>
- Conley, Caryn, dan Jennifer Tosti-Kharas. 2014. "Crowdsourcing Content Analysis for Managerial Research", *Management Decision*, vol. 52, no. 4 : 675-688. Diakses pada 17 Juni 2018. <https://doi.org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1108/MD-03-2012-0156>
- Creswell, John W . 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London : Sage Publication, Inc.
- Giligan, Thomas W., & Matsusaka J. G. 2001. "Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century" Dikutip dalam Syafitri, Febriyani. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Program S1 Ekstensi Akuntansi. Universitas Indonesia. Depok.
- Hermana, dkk. 2012. "Information Richness, Website Feature, and Financial Transparency on the Local Government Website in Indonesia". *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, vol 43, no. 2, pp. 229-235.
- Huwae, Kartini. 2016. "Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah". Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Justice, J. B., Melitski, J., & Smith, D. L. 2006. "E-government as an Instrument of Fiscal Accountability and Responsiveness: Do the Best Practitioners Employ the Best Practices?" Dikutip dalam García-Sánchez, Isabel-María, Isabel Gallego-Álvarez, dan Luis Rodríguez-Domínguez. 2010. "Are Determining Factors of Municipal E-Government Common to a Worldwide Municipal View? An Intra-Country Comparison" *Government Information Quarterly*, vol. 27 : 423-430. Diakses pada 23 Juli 2018. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.011>.

- Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2012. Indonesia Governance Index 2012 : Towards A Well-Informed Society and Responsive Government. Diakses pada 19 Juli 2018.
<http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/envi/PGA%20Report%20English%20Final.pdf>.
- Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2014. Menata Indonesia dari Daerah : Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2015. Diakses pada 19 Juli 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/45192-ID-menata-indonesia-dari-daerah-laporan-eksekutif-indonesia-governance-index-2014.pdf>.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Diakses pada 16 Juni 2018.
<http://www.knkgindonesia.org/dokumen/Pedoman-Good-Public-Governance.pdf>.
- Laswad, F., Richard Fisher, dan Peter Oyelere. 2005. "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities." *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 24, no. 2 : 101-121. Diakses pada 18 Juli 2018.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425404000973>
- Liestiani, Sigit I. 2010. "Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006" Dikutip dalam Syafitri, Febriyani. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Program S1 Ekstensi Akuntansi. Universitas Indonesia. Depok.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Dikutip dalam Karlina, Anis. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6, no. 3 : 912.
- Martani, Dwi, Debby Fitriyani dan Annisa. 2013. "Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Proceeding PESAT*, vol. 5, ISSN: 1858-2559.
- Martani, Dwi, Debby Fitriyani dan Annisa. 2014. "Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia". *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, vol. 60, no. 3 : 501-516. Diakses pada 14 Juni 2018.
<http://www.jatit.org/volumes/Vol60No3/6Vol60No3.pdf>

- Medina, Febri. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Ekstensi Akuntansi. Universitas Indonesia. Depok.
- Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 188/52/1797/SJ Tahun 2015 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Robbins, Walter A., dan Kenneth R. Austin. 1986. "Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure", *Journal of Accounting Research*, vol. 24, no. 2 : 412-421. Diakses pada 25 Juli 2018. <http://www.jstor.org/stable/2491145>.

- Rokhimah, Siti. 2017. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis *Website* pada Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Soudry, Ohad. 2007. "A Principal-Agent Analysis of Accountability in Public Procurement" Dikutip dalam Thai, Khi V., dan Gustavo Piga. 2007. *Advancing Public Procurement: Practices, Innovation and Knowledge Sharing*, 432, 435. USA: PrAcademics Press. Diakses pada 16 Juni 2018. http://www.ippa.org/ippc2_book.html
- Syamsul. 2017. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia". Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Thornton, Joel B, dan Elaine Thornton. 2013. "Assessing State Government Financial Transparency Websites", *Reference Services Review*, vol. 41, no. 2 : 366-387. Diakses pada 13 Juni 2018. <https://doi.org/10.1108/00907321311326273>